

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah melakukan analisis isi pada 85 teks berita konflik Keraton Kasunanan Surakarta di Harian SOLOPOS pada bulan Mei 2012-April 2014, peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yaitu apakah Surat Kabar Harian SOLOPOS menggunakan pendekatan jurnalisme damai dalam pemberitaan konflik Keraton Kasunanan Surakarta.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa berita Harian SOLOPOS tentang konflik Keraton Kasunanan Surakarta sudah menggunakan pendekatan jurnalisme damai. Hal ini dapat dilihat dari delapan unit analisis, yaitu akar masalah, fokus pemberitaan, diksi kekerasan, keseimbangan berita, narasumber, pelaku konflik, solusi, dan pelaku perdamaian.

Pendekatan jurnalisme damai yang tidak dapat terpenuhi dapat dilihat dalam sub unit analisis akibat masalah, karena hasil penelitian menunjukkan pemberitaan tidak menampilkan akibat konflik fisik maupun non fisik.

Harian SOLOPOS, jika dilihat melalui tahap konflik, terdapat pendekatan jurnalisme damai yang belum digunakan. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui sembilan sub unit analisis yang telah ditetapkan oleh peneliti, berikut kesimpulannya:

1. Pada tahap penyebab konflik, prinsip pendekatan jurnalisme damai yang tidak terpenuhi dilihat dalam sub unit analisis akibat konflik yang lebih memilih

tidak memaparkan akibat konflik fisik maupun non fisik. Dari unit analisis narasumber hanya berfokus pada abdi dalem sebagai penderita dan pemerintah sebagai pemberi solusi. Selain itu berita juga didominasi oleh tidak adanya solusi yang dipaparkan dan tidak adanya nama-nama pelaku perdamaian.

2. Tahap proses inti konflik, prinsip jurnalisme damai yang tidak dapat terpenuhi dapat dilihat dalam sub unit analisis fokus pemberitaan yang lebih berfokus pada arena konflik, bukan pada solusi-solusi yang diberikan.
3. Pada tahap akibat konflik, prinsip jurnalisme damai yang tidak dapat terpenuhi dapat dilihat dalam dimensi orientasi perdamaian. Hal yang paling menonjol adalah pemberitaan yang tidak memaparkan akibat konflik fisik maupun non fisik dan berita yang lebih fokus pada arena konflik.
4. Pada tahap penyelesaian konflik, prinsip jurnalisme damai yang tidak dipenuhi hanya pada dimensi orientasi perdamaian. Hal yang paling menonjol adalah sub unit analisis akibat konflik, di mana pemberitaan tidak memaparkan akibat konflik fisik maupun non fisik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan di antara keseluruhan berita dengan berita yang sudah dikelompokkan menjadi empat bagian. Bahwa penelitian yang lebih mendalam dengan membagi berita menjadi empat tahap konflik memberikan hasil yang lebih bervariasi dibandingkan hanya keseluruhan berita.

## **B. SARAN**

Penelitian ini ingin melihat bagaimana sebuah berita konflik dilihat dari pendekatan jurnalisme damai. Peneliti menyadari bahwa penelitian yang

menggunakan pendekatan jurnalisme damai sudah banyak dilakukan, sehingga peneliti mencoba membandingkan hasil keseluruhan berita dengan berita yang sudah dikelompokkan sesuai tahap terjadinya konflik.

Peneliti melihat analisis hanya dari satu media saja yaitu Surat Kabar Harian SOLOPOS. Banyak hal yang bisa digali dengan membandingkan dengan koran lokal lain yang berada di wilayah Surakarta, seperti Radar Solo.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Ishwara, Luwi. 2011. *Jurnalisme Dasar*. Jakarta : Kompas Media Nusantara
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Media Kit Harian Umum SOLOPOS.2014
- Nurudin, 2009. *Jurnalistik Masa Kini*. Jakarta : Rajawali Pers
- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken. 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Pardede, J. Anton Pemiliana. 2007. *Meretas Jurnalisme Damai Di Aceh*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosunanto. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia III Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Setiati, Eni. 2005. *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*. Yogyakarta : Andi
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *METODE Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES

Siregar, Ashadi. 1998. *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*.

Yogyakarta : Kanisius.

Sudibyo, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta : LkiS

Yogyakarta

Susan, Novri. 2009. *Sosiologi konflik dan isu – isu Konflik Kontemporer*. Jakarta

: Kencana.

Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto. 2005. *Terori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta:

Kanisius

Syahputra, Iswandi. 2006. *JURNALISME DAMAI Meretas Ideologi Peliputan di*

*Area Konflik*. Yogyakarta : P\_Idea

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1993. *Kamus*

*Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998. *Kamus*

*Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Wibowo, Wahyu. 2009. *Menuju Jurnalisme Beretika: Peran Bahasa, Bisnis, dan*

*Politik di era Mondial*. Jakarta : Kompas Media Nusantara

#### **Sumber Tidak Dipublikasi**

Company Profile Perusahaan SKH SOLOPOS. 2013

Hutagalung, Ratna Ayu BR. 2013. *Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan*

*Kerusuhan Temanggung*. Skripsi UAJY

#### **Artikel Surat Kabar**

SOLOPOS. *Sebagian Sentana Tak Akui Rekonsiliasi*, 19 Mei 2012

SOLOPOS. *PB XIII Hangabehi Dikudeta*, 22 Mei 2012

SOLOPOS. *Wacana PB XIII Dimentahkan*, 23 Mei 2012

SOLOPOS. *2 Putri Adu Kuat*, 1 Juni 2012

SOLOPOS. *Puger : Cooling Down!*, 3 Juni 2012

SOLOPOS. *Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum*, 11 Juni 2012

SOLOPOS. *Pakasa Sragen Tak Akui Patih Keraton*, 20 Juni 2012

SOLOPOS. *Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru*, 23 November 2012

SOLOPOS. *Wali Kota: Rampungkan Konflik Tanpa Tendensi*, 27 Agustus 2013

SOLOPOS. *Warga Baluwarti Curhat ke Raja*, 30 Agustus 2013

SOLOPOS. *Warga Magersari Keraton Resah*, 31 Agustus 2013

SOLOPOS. *Pekan Depan, 2 Kubu Dimediasi*, 12 September 2013

SOLOPOS. *Warga Ingin PB XIII Kembali Kesinggasana*, 5 Oktober 2013

SOLOPOS. *Penyelesaian Konflik Keraton Susai Pemilu*, 24 Februari 2013

#### **Internet**

<http://m.news.viva.co.id/news/read/439386-kisruh-panjang-keraton-solo--apa-sebabnya-> diakses 29 April 2014 jam 19.15

<http://pwi.or.id/index.php/sejarah/770-sekilas-sejarah-pers-nasional> diakses 6 September 2014 jam 20.50

[http://issuu.com/tifafoundation/docs/resolusi\\_konflik\\_upload](http://issuu.com/tifafoundation/docs/resolusi_konflik_upload) diakses 19 September 2014 jam 22.42

**Jurnalisme Damai Dalam Pemberitaan SKH Solopos Mengenai Konflik Keraton  
Kasunanan Surakarta periode Mei 2012-April 2014**

Nama Pengkoder :

NPM Pengkoder :

Judul Berita :

Hari dan Tanggal :

**Dimensi Orientasi Perdamaian**

1. Akibat konflik
  - a. Fisik
  - b. Non Fisik
  - c. Fisik dan Non Fisik
  - d. Tidak ada
2. Akar masalah
  - a. Ditampilkan
  - b. Tidak ditampilkan
3. Fokus pemberitaan
  - a. Arena konflik
  - b. Solusi
  - c. Arena konflik dan solusi
4. Diksi kekerasan
  - a. Ada kekerasan
  - b. Tidak ada kekerasan

**Dimensi Orientasi Kebenaran**

1. *Balance* atau keseimbangan berita
  - a. Satu sisi
  - b. Dua sisi
  - c. Multi sisi

**Dimensi Orientasi Golongan Masyarakat**

1. Narasumber
  - Masyarakat
    - a. Ada
    - b. Tidak ada
  - Abdi Dalem
    - a. Ada
    - b. Tidak Ada
  - Pemerintah

- a. Ada
- b. Tidak ada
- Akademisi
  - a. Ada
  - b. Tidak ada
- Pengamat Budaya
  - a. Ada
  - b. Tidak ada
- Aparat Keamanan
  - a. Ada
  - b. Tidak ada
- 2. Pelaku kekerasan/konflik
  - a. Disebut dengan label
  - b. Disebut tanpa label
  - c. Tidak disebut

**Dimensi Orientasi Penyelesaian**

- 1. Solusi
  - a. Ada
  - b. Tidak ada
- 2. Pelaku perdamaian konflik
  - a. Disebutkan
  - b. Tidak disebutkan



Lampiran 1

**Uji Reliabilitas dari Coder 1**

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

1. Akibat Konflik

Tabel 1

Jawaban Peneliti dan Coder 1

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	B	B
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	B	B
5	2 Kubu Keraton Bentrok	C	C
6	Warga Magersari Keraton Resah	C	C
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	D	D
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	B	B
	TOTAL M	8	8

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(8)}{8 + 8}$$
$$= 1$$

2. Akar Masalah

Tabel 2

Jawaban Peneliti dan Coder 1

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	A	A

2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	A	A
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	A	A
4	Raja Solo Disandera	A	A
5	2 Kubu Keraton Bentrok	A	A
6	Warga Magersari Keraton Resah	A	A
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	B	B
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	A	A
	TOTAL M	8	8

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(8)}{8 + 8}$$

$$= 1$$

### 3. Fokus Pemberitaan

Tabel 3

Jawaban Peneliti dan Coder 1

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	C	C
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	A	A
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	C	C
4	Raja Solo Disandera	C	C
5	2 Kubu Keraton Bentrok	A	A
6	Warga Magersari Keraton Resah	C	C
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	B	B
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	B	B
	TOTAL M	8	8

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(8)}{8 + 8}$$
$$= 1$$

4. Diksi Kekerasan

Tabel 4

Jawaban Peneliti dan Coder 1

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	B	B
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	B	B
5	2 Kubu Keraton Bentrok	A	A
6	Warga Magersari Keraton Resah	B	B
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	B	B
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	B	B
	TOTAL M	8	8

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(8)}{8 + 8}$$
$$= 1$$

5. Opini Jurnalis

Tabel 5

Jawaban Peneliti dan Coder 1

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	B	B

2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	B	B
5	2 Kubu Keraton Bentrok	B	B
6	Warga Magersari Keraton Resah	B	B
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	B	B
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	B	B
	TOTAL M	8	8

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(8)}{8 + 8}$$

$$= 1$$

#### 6. Keseimbangan Berita

Tabel 6

Jawaban Peneliti dan Coder 1

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	C	C
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	C	C
5	2 Kubu Keraton Bentrok	C	C
6	Warga Magersari Keraton Resah	C	C
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	B	B
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	A	A
	TOTAL M	8	8

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(8)}{8 + 8}$$
$$= 1$$

7. Narasumber Masyarakat

Tabel 7

Jawaban Peneliti dan Coder 1

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	B	B
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	B	B
5	2 Kubu Keraton Bentrok	A	A
6	Warga Magersari Keraton Resah	A	A
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	B	B
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	A	A
	TOTAL M	8	8

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(8)}{8 + 8}$$
$$= 1$$

8. Narasumber Abdi Dalem

Tabel 8

Jawaban Peneliti dan Coder 1

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	A	A

2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	A	A
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	A	A
4	Raja Solo Disandera	A	A
5	2 Kubu Keraton Bentrok	A	A
6	Warga Magersari Keraton Resah	A	A
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	A	A
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	B	B
	TOTAL M	8	8

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(8)}{8 + 8}$$

$$= 1$$

#### 9. Narasumber Pemerintah

Tabel 9

Jawaban Peneliti dan Coder 1

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	A	A
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	A	A
4	Raja Solo Disandera	B	B
5	2 Kubu Keraton Bentrok	B	B
6	Warga Magersari Keraton Resah	A	A
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	A	A
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	B	B
	TOTAL M	8	8

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(8)}{8 + 8}$$
$$= 1$$

10. Narasumber Akademisi

Tabel 10

Jawaban Peneliti dan Coder 1

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	B	B
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	B	B
5	2 Kubu Keraton Bentrok	B	B
6	Warga Magersari Keraton Resah	B	B
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	B	B
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	B	B
	TOTAL M	8	8

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(8)}{8 + 8}$$
$$= 1$$

11. Narasumber Pengamat Budaya

Tabel 11

Jawaban Peneliti dan Coder 1

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	A	A

2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	A	A
5	2 Kubu Keraton Bentrok	B	B
6	Warga Magersari Keraton Resah	A	A
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	B	B
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	B	B
	TOTAL M	8	8

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(8)}{8 + 8}$$

$$= 1$$

## 12. Narasumber Aparat Keamanan

Tabel 12

Jawaban Peneliti dan Coder 1

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	B	B
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	B	B
5	2 Kubu Keraton Bentrok	A	A
6	Warga Magersari Keraton Resah	A	A
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	B	B
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	B	B
	TOTAL M	8	8



Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(8)}{8 + 8}$$
$$= 1$$

13. Pelaku Konflik

Tabel 13

Jawaban Peneliti dan Coder 1

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	B	B
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	B	B
5	2 Kubu Keraton Bentrok	A	A
6	Warga Magersari Keraton Resah	B	A
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	A	A
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	B	B
	TOTAL M		7

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(7)}{8 + 8}$$
$$= 0,87$$

14. Solusi

Tabel 14

Jawaban Peneliti dan Coder 1

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	A	A

2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	A
4	Raja Solo Disandera	A	A
5	2 Kubu Keraton Bentrok	B	B
6	Warga Magersari Keraton Resah	A	A
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	A	A
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	A	A
	TOTAL M		7

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(7)}{8 + 8}$$

$$= 0,87$$

#### 15. Pelaku Perdamaian

Tabel 15

Jawaban Peneliti dan Coder 1

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 1
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	A	A
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	A	A
5	2 Kubu Keraton Bentrok	B	A
6	Warga Magersari Keraton Resah	A	A
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	A	A
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	A	A
	TOTAL M		7

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(7)}{8 + 8}$$
$$= 0,87$$

### Uji Reliabilitas dari Coder 2

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

#### 1. Akibat Konflik

Tabel.1

Jawaban Peneliti dan Coder 2

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 2
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	B	B
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	B	B
5	2 Kubu Keraton Bentrok	C	C
6	Warga Magersari Keraton Resah	C	B
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	D	D
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	B	B
	TOTAL M		7

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(7)}{8 + 8}$$
$$= 0,87$$

#### 2. Akar Masalah

Tabel 2

## Jawaban Peneliti dan Coder 2

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 2
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	A	A
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	A	A
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	A	A
4	Raja Solo Disandera	A	A
5	2 Kubu Keraton Bentrok	A	A
6	Warga Magersari Keraton Resah	A	A
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	B	B
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	A	B
	TOTAL M		7

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(7)}{8 + 8}$$

$$= 0,87$$

## 3. Fokus Pemberitaan

Tabel 3

## Jawaban Peneliti dan Coder 2

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 2
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	C	C
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	A	A
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	C	A
4	Raja Solo Disandera	C	A
5	2 Kubu Keraton Bentrok	A	A
6	Warga Magersari Keraton Resah	C	A
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	B	B

8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	B	B
	TOTAL M	6	

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(6)}{8 + 8}$$

$$= 0,75$$

#### 4. Diksi Kekerasan

Tabel 4

Jawaban Peneliti dan Coder 2

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 2
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	B	B
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	B	A
5	2 Kubu Keraton Bentrok	A	A
6	Warga Magersari Keraton Resah	B	A
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	B	B
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	B	B
	TOTAL M	6	

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(6)}{8 + 8}$$

$$= 0,75$$

## 5. Opini Jurnalis

Tabel 5

Jawaban Peneliti dan Coder 2

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 2
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	B	A
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	B	B
5	2 Kubu Keraton Bentrok	B	B
6	Warga Magersari Keraton Resah	B	B
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	B	B
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	B	B
	TOTAL M		7

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(7)}{8 + 8}$$

$$= 0,87$$

## 6. Keseimbangan Berita

Tabel 6

Jawaban Peneliti dan Coder 2

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 2
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	C	C
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	C	C
5	2 Kubu Keraton Bentrok	C	C

6	Warga Magersari Keraton Resah	C	C
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	B	A
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	A	A
	TOTAL M		7

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(7)}{8 + 8}$$

$$= 0,87$$

#### 7. Narasumber Masyarakat

Tabel. 7

Jawaban Peneliti dan Coder 2

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 2
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	B	B
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	B	B
5	2 Kubu Keraton Bentrok	A	A
6	Warga Magersari Keraton Resah	A	A
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	B	B
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	A	A
	TOTAL M	8	8

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(8)}{8 + 8}$$

$$= 1$$

#### 8. Narasumber Abdi Dalem

Tabel 8

## Jawaban Peneliti dan Coder 2

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 2
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	A	A
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	A	A
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	A	A
4	Raja Solo Disandera	A	A
5	2 Kubu Keraton Bentrok	A	A
6	Warga Magersari Keraton Resah	A	A
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	A	A
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	B	B
	TOTAL M	8	8

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(8)}{8 + 8}$$

$$= 1$$

## 9. Narasumber Pemerintah

Tabel 9

## Jawaban Peneliti dan Coder 2

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 2
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	A	A
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	A	A
4	Raja Solo Disandera	B	B
5	2 Kubu Keraton Bentrok	B	B
6	Warga Magersari Keraton Resah	A	A
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	A	A



8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	B	B
	TOTAL M	8	8

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(8)}{8 + 8}$$

$$= 1$$

#### 10. Narasumber Akademisi

Tabel 10

Jawaban Peneliti dan Coder 2

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 2
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	B	B
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	B	B
5	2 Kubu Keraton Bentrok	B	B
6	Warga Magersari Keraton Resah	B	B
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	B	B
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	B	B
	TOTAL M	8	8

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(8)}{8 + 8}$$

$$= 1$$

#### 11. Narasumber Pengamat Budaya

Tabel 11

Jawaban Peneliti dan Coder 2

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 2
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	A	A
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	A	A
5	2 Kubu Keraton Bentrok	B	B
6	Warga Magersari Keraton Resah	A	A
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	B	B
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	B	B
	TOTAL M	8	8

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(8)}{8 + 8}$$

$$= 1$$

12. Narasumber Aparat Keamanan

Tabel 12

Jawaban Peneliti dan Coder 2

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 2
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	B	B
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	B	B
5	2 Kubu Keraton Bentrok	A	A
6	Warga Magersari Keraton Resah	A	A
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	B	B
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	B	B

	TOTAL M	8	8
--	---------	---	---

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(8)}{8 + 8}$$

$$= 1$$

### 13. Pelaku Konflik

Tabel 13

Jawaban Peneliti dan Coder 2

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 2
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	B	B
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	B	B
5	2 Kubu Keraton Bentrok	A	B
6	Warga Magersari Keraton Resah	B	B
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	A	C
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	B	B
	TOTAL M		6

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(6)}{8 + 8}$$

$$= 0,75$$

### 14. Solusi

Tabel 14

Jawaban Peneliti dan Coder 2

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 2
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	A	B
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	B
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	A	B
5	2 Kubu Keraton Bentrok	B	B
6	Warga Magersari Keraton Resah	A	A
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	A	A
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	A	A
	TOTAL M		6

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(6)}{8 + 8}$$

$$= 0,75$$

#### 15. Pelaku Perdamaian

Tabel 15

Jawaban Peneliti dan Coder 2

No	Judul Berita	Peneliti	Coder 2
1	PB XIII Hangabehi Dikudeta	A	A
2	Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum	B	A
3	Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton	B	B
4	Raja Solo Disandera	A	A
5	2 Kubu Keraton Bentrok	B	B
6	Warga Magersari Keraton Resah	A	A
7	Pekan Depan 2 Kubu Dimediasi	A	A
8	Warga Ingin PB XIII Kembali Ke Singgasana	A	B
	TOTAL M		6

Hasil uji reliabilitas

$$CR = \frac{2(6)}{8 + 8}$$

$$= 0,75$$



## PB XIII Hangabehi Dikudeta

### SOLO (ESPOS)

Sejumlah sentana dan pengageng Keraton Sura-karta Hadiningrat menetapkan GPH Puger sebagai caretaker atau pelaksana tugas (plt) PB XIII Hangabehi.

Selain itu, putra tertua Hangabehi, KGPH Mangkubumi ditetapkan sebagai Pangeran Adipati Anom atau putra mahkota. Upaya penetapan GPH Puger dan penetapan KGPH Mangkubumi sebagai putra mahkota untuk selanjutnya menjadi PB XIV tersebut dianggap sebagai kudeta terhadap PB XIII Hangabehi.

Penetapan itu dilakukan dalam sebuah rapat para sentana, pengageng, serta trah Keraton mulai dari PB I hingga PB XIII di kompleks Keraton, Senin (21/5) sore. Penetapan KGPH Mangkubumi sebagai Pangeran Adipati Anom itu merupakan langkah resmi sebelum yang bersangkutan menyandang gelar seorang raja. Penetapan KGPH Mangkubumi sebagai putra mahkota itu disampaikan kepada seratusan lebih anggota Paguyuban Kawula Keraton Sura-karta (Pakasa) yang berkumpul di Bangsal Semarakata, Senin sore.

Dalam rapat tersebut, wartawan tidak diperbolehkan masuk ke kompleks Keraton. Wartawan baru diperbolehkan masuk ke dalam Keraton saat rapat Pakasa yang dipimpin GRAY Koes Murtiyah alias Mbak Moeng, Eddy Wirabhumi serta sejumlah kerabat Keraton digelar. Meski demikian, Espos berhasil mendapatkan notulen dari salah satu anggota Pakasa yang mencatat hasil pertemuan itu.

Dalam rapat itu, tampak KGPH Mangkubumi bersama GPH Puger. Meski demikian, keduanya tak bersedia memberikan keterangan kepada wartawan. Sementara itu, Eddy Wirabhumi ketika dicegat wartawan menjelaskan yang dilakukan lembaga adat selama ini ialah menyelamatkan posisi raja dan Keraton. Ketika didesak soal penetapan KGPH Mangkubumi sebagai putra mahkota, Eddy tak menjawab secara langsung. Dia hanya menjelaskan bahwa Mangkubumi adalah putra tertua dari raja sekarang sehingga dialah yang memiliki kesempatan pertama menduduki dan menggantikan posisi raja. "Namun, tak perlu ada yang mendorong-dorong. Biar semua proses berjalan sesuai paugeran-nya," jelasnya.

Untuk memperkuat argumentasi, Eddy juga menyitir kisah pada masa PB VI yang dibuang ke luar Jawa oleh pemerintah Belanda. Kala itu, jelasnya, sistem pemerintahan di Keraton tetap jalan lantaran ada lembaga adat yang mengatur pemerintahan. Begitu pun kisah PB IX dan PB X yang kala itu sudah dikendalikan anaknya, yakni PB X. "Nah, sama dengan sekarang kan. PB XIII punya putra."

Soal pengangkatan selir sebagai permaisuri, menurut Eddy, ada aturan yang sangat ketat. "Nggak semudah itu seorang raja mengangkat selir menjadi permaisuri. Raja harus sejalan dengan aturan adat," terangnya.

Mangkubumi adalah putra lelaki tertua PB XIII Hangabehi dari istri keduanya, Winarti. Pernikahan mereka kandas dan berujung perceraian ketika usia Mangkubumi masih kecil.

Mengomentari hal tersebut, sejarawan muda Solo, Heri Priyatmoko menegaskan, penetapan KGPH Mangkubumi sebagai Pangeran Adipati Anom dinilai tak sah. Sebab,

penetapan tersebut tanpa kesepakatan Raja PB XIII Hangabehi saat ini yang masih hidup. “Kuncinya itu kan ada kesepakatan dulu dengan rajanya. Kalau tanpa sepengetahuan raja, ya itu tak bisa dibenarkan,” paparnya.

Dia juga membantah analogi bahwa pengangkatan PB X dulu juga dilakukan ketika ayahnya, PB IX masih hidup. Padahal, kata Heri, pengangkatan PB X dilakukan pada 30 Maret 1893 di mana kala itu ayahnya, PB IX telah wafat. “Jadi, ini membuktikan bahwa alasan Keraton terkesan mengada-ada,” paparnya.

Begitu pun dengan pengangkatan GPH Puger sebagai caretaker atau pelaksana tugas PB XIII Hangabehi, di mata Heri, juga janggal. Alasannya, pengangkatan caretaker pun harus sepengetahuan raja.

Sementara itu, juru bicara KGPHPA Tedjowulan, KRH Bambang Pradotonagoro juga mengungkapkan hal senada. Menurutnya, Mangkubumi adalah putra selir PB XIII dari istri yang telah dicerai. Alasan cerai inilah yang tak bisa dibenarkannya dalam mengangkat putra mahkota.

Di sisi lain, GPH Suryo Wicaksono yang kerap disapa Gusti Nino mengatakan penetapan GPH Puger Plt raja bisa kualat. “GPH Puger yang tahu angger-angger keraton bisa kualat leluhur. Sedangkan anak Hangabehi kami nilai sebagai kudeta,” katanya, melalui pesan singkat kepada Espos, Senin malam.

Pada bagian lain, Walikota Solo, Joko Widodo mengaku menyayangkan resistensi kalangan keluarga Keraton terhadap upaya perdamaian dan rekonsiliasi antara dua raja, Hangabehi dan Tedjowulan. “Saya tidak mengerti. Rakyat saja senang dengan penyatuan itu. Lha ini keluarga Keraton sendiri malah ada yang menolak,” jelas Jokowi, saat ditemui wartawan, Senin.

Disinggung soal rencana kirab mengantarkan masuknya Tedjowulan dan Hangabehi dari balaikota ke keraton maupun soal penampilan kedua raja di depan publik Solo untuk menjelaskan rekonsiliasi, Jokowi mengatakan hal itu masih dirancang.

Di sisi lain, ancaman abdi dalem yang tergabung dalam Pakasa mengerahkan massa untuk menggeruduk Balaikota Solo, Senin (21/5), ternyata hanya gertak sambal. Pantauan Espos hingga siang kemarin, tidak ada massa dari Keraton yang datang ke Balaikota. Sedangkan di Keraton sendiri memang terjadi pengumpulan massa anggota Pakasa. Kedatangan mereka atas undangan dari pihak Keraton untuk mendengarkan pengarahan agar tetap tenang.

“Kami sudah ingatkan agar pakasa bisa menahan diri,” kata Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton Kasunanan Surakarta, Eddy Wirabhumi.

Meski akhirnya tidak terbukti, ancaman Pakasa untuk menggeruduk balaikota menimbulkan keresahan dari kalangan warga Baluwarti, Pasar Kliwon. Senin malam, belasan warga kelurahan di dalam tembok keraton itu mengadakan pertemuan di rumah juru bicara Tedjowulan, Bambang Pradotonagoro di wilayah RT 002/RW 003, Baluwarti.

Seorang pengurus Karang Taruna Kelurahan Baluwarti yang saat itu mengikuti pertemuan, Danang Wahyu Nugraha, meminta aparat kepolisian siaga. Peralnya, ia tak ingin kejadian kerusuhan di Gandekan terulang di Baluwarti. - Tim Espos/Aries Susanto, Mulyanto Utomo, Suharsih, Nenden SAN

### Mbak Moeng: Tedjowulan Harus Dihukum

#### SOLO (ESPOS)

Konflik Keraton Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali memanas. Pengageng Sasana Wilapa, GKR Wandansari atau biasa disapa Mbak Moeng bersikukuh menganggap Tedjowulan sebagai figur atau pihak yang salah.

Tanpa sungkan putri Paku Buwono (PB) XII yang juga menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat itu menilai Tedjowulan harus mendapat hukuman. "Kalau menurut saya pribadi, dia (Tedjowulan-red) orang yang salah di mata hukum nasional maupun hukum adat keraton. Wong (Orang-red) salah harus dihukum, salah kok dilindungi, dipaksa-paksakan," katanya menjawab pertanyaan Espos, Minggu (10/6), mengenai kemungkinan kembalinya KGPHPA Tedjowulan ke dalam Keraton, Minggu.

Dia masih mempersoalkan opini dualisme raja yang menurutnya digembargemborkan kubu Tedjowulan. Mengenai surat permintaan maaf dari Tedjowulan yang sebelumnya akan dilayangkan melalui lembaga resmi keraton yakni Kusumowandowo, menurut Mbak Moeng hingga Minggu sore belum sampai.

Ditanya sikapnya mengenai rencana permintaan maaf Tedjowulan, menurut dia, yang berhak menyikapi adalah PB XIII Hangabehi bersama lembaga Keraton Kasunanan Surakarta.

Pernyataan Mbak Moeng itu bertolak belakang dengan pernyataannya Sabtu (9/6) lalu. Pada Sabtu lalu, Mbak Moeng mengaku siap menerima kedatangan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan dalam acara tingalan jumenengan 15 Juni.

"Ya kami bisa menerima rombongan Tedjowulan, sambil menunggu surat permohonan maaf tertulis yang ditujukan ke Kasentanan Dalem," jelas Mbak Moeng ketika ditemui wartawan di Bangsal Smarakata Keraton, Sabtu (9/6) (SOLOPOS, 10/6).

Sementara itu, Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta, KP Winarno Kusumo mengatakan persiapan tingalan jumenengan ke-8 PB XIII Hangabehi terus dilakukan.

Menurut dia, tidak ada sesuatu yang berbeda dalam tingalan jumenengan kali ini. Tapi dikarenakan waktu tingalan jumenengan berlangsung Jumat, untuk prosesi wisudan atau kenaikan pangkat abdi dalem dilakukan Sabtu-Minggu (9-10/6).

Secara terpisah, Juru Bicara Dwitunggal, KRH Bambang Pradotonagoro, menegaskan tidak akan menanggapi pernyataan Mbak Moeng. Tujuannya untuk menjaga kondusivitas menjelang tingalan jumenengan. Bambang mengaku tidak tahu perkembangan rencana permintaan maaf Tedjowulan kepada PB XIII Hangabehi. – Kurniawan



### Lembaga Adat Tidak Akui Kabinet Baru Keraton

#### PASAR KLIWON—

Lembaga Adat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tidak mengakui adanya pembentukan kabinet baru versi Dwitunggal PB XIII dan Mahapatih KGPH PA Tedjowulan. Mereka menilai kabinet baru tidak diatur dalam undang-undang (UU) dan tidak berlandaskan hukum. "Yang menginginkan pembentukan kabinet baru itu siapa? Jangankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, Presiden pun tidak bisa meminta kita membuat atau membentuk kabinet baru selama lembaga adat Keraton tidak menyalahi garis visi sentana," tegas Pengageng Pariwisata dan Museum 3 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, KRMH Satryo Hadinagoro, saat dihubungi Espos, Kamis (22/11).

Satryo menduga keinginan pembentukan kabinet baru merupakan kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan segelintir orang yang ingin memperkeruh kondisi Keraton."Kalau ada pihak yang mengatakan tidak cairnya bantuan dana dari pemerintah karena belum terbentuk kabinet baru, itu mengacu pada aturan mana? Ada enggak aturan [UU] yang mengatakan seperti itu. Di dalam UU tidak ada kata-kata yang mengharuskan adanya kabinet baru, kita kembali ke khitah saja," jelas Satryo.

Saat disinggung adanya dukungan dari putra kakung Keraton mengenai pembentukan kabinet baru, Satryo justru mempertanyakan putra yang dimaksud. Dirinya menjelaskan Keraton Solo bukanlah milik putra putri Paku Buwono (PB) XII, sebab pewaris Keraton Solo adalah Dinasti Mataram Islam.

Sementara itu, Lembaga Dewan Adat menduga ada pihak yang bermain di balik macetnya dana bantuan Keraton. Sebelumnya, Gubernur Jateng, Bibit Waluyo, enggan mencairkan bantuan lantaran rekonsiliasi Keraton tak berjalan.

Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton, Eddy Wirabhumi, menyebut ketidakjelasan pencairan dana Pemprov Rp1,1 miliar itu sudah sangat meresahkan. Pasalnya, dana itu untuk membayar gaji 518 abdi dalem. Kasus itu, lanjut Eddy, juga merembet kepada anggaran pusat senilai Rp10 miliar untuk revitalisasi Keraton.

"Ada oknum yang mendesak pencairan dana harus melalui kabinet baru, padahal kabinet ini tidak jelas. Itu hanya permainan oknum pemerintah," ujar dia kepada wartawan, Kamis.

Sementara untuk bantuan dari Pemkot, Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, memberi tenggat pencairan hingga 15 Desember 2012. Saat ini pihaknya sedang menunggu syarat berupa permohonan hibah berlegitimasi PB XIII berikut laporan pertanggungjawaban (LPj).  
- (Muhammad Khamdi/Chrisna Chanis Cara)

## Raja Solo Disandera

SOLO—Prosesi Tingalan Jumenengan ke-9 Paku Buwono (PB) XIII di Sasana Sewaka Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Selasa (4/6) siang, digelar tanpa dihadiri Raja Solo, PB XIII.

Hal itu dikarenakan tempat tinggal PB XIII di Sasana Narendra menuju Keraton dikunci rapat. Informasi yang dihimpun Espos dari berbagai sumber, Keraton versi Dwitunggal menyatakan PB XIII tidak hadir lantaran pintu Sasana Narendra yang menghubungkan ke Keraton dikunci oleh kerabat Keraton yang tidak mengakui rekonsiliasi.

Alasan lainnya, PB XIII sengaja tidak hadir dalam jumenengan dengan alasan untuk menghindari konflik internal Keraton yang tak kunjung rampung.

Tidak hanya raja yang tertahan masuk ke Keraton, abdi dalem dan sentana pro rekonsiliasi juga tidak bisa memasuki Keraton karena sejumlah pintu masuk Keraton tertutup rapat.

Dalam situasi seperti itu, nyaris terjadi ketegangan antarpetugas keamanan dengan abdi dalem dan para sentana dari luar kota. Beruntung, ketegangan tersebut tak berujung adu fisik. Para sentana dan abdi dalem memilih mengalah dan menempati Sasana Putra.

Sumber Espos lainnya menyebutkan, Lembaga Adat Keraton mengirimkan surat kepada PB XIII yang isinya melarang tiga orang masuk ke dalam Keraton. Tiga orang itu yaitu Permaisuri PB XIII, Mahapatih KGPH PA Tedjowulan dan KRH Adipati Sosronagoro.

Setelah menerima surat itu, kubu pro rekonsiliasi mengadakan rapat mendadak dan memutuskan Tedjowulan dan pengikutnya tidak akan datang ke Keraton. Namun posisi Tedjowulan berada di Solo.

”Sinuhun sekarang ada di dalam [Sasana Narendra]. Prinsipnya Sinuhun tidak hadir karena ingin merukunkan semua keluarga Keraton. Jadi beliau orang yang bijaksana,” kata Juru Bicara PB XIII, KPPA Condro Kusumo yang bernama asli Begug Poernomosidi saat dijumpai wartawan, di Sasana Putra Keraton, Selasa siang.

Mantan Bupati Wonogiri itu mengatakan PB XIII menyadari Keraton merupakan aset bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan PB XIII tidak menghadiri acara jumenengan untuk merangkul semua adik-adiknya. ”Keraton ini merupakan kerajaan tertua Mataram. Sangat disayangkan apabila Keraton hancur lantaran masalah internal. Sinuhun berat sebagai raja karena harus ngayomi semua. Harapan Sinuhun hanya ingin semua kembali menyatu,” kata dia.

Sementara itu, Lembaga Adat Keraton yang menyelenggarakan jumenengan mengatakan ketidakhadiran PB XIII bukanlah masalah besar. ”Raja itu disumpah oleh diri sendiri. Apabila menyatakan hari ini menjadi seorang raja ya harus menjalankan dan mengikuti sejumlah upacara adat. Makanya beliau harus datang. Di Keraton mengedepankan kewajiban bukan hak,” kata menantu PB XII, KRMH Satriyo Hadinagoro, kepada wartawan, sebelum acara jumenengan.

Kondisi Raja

Menurut dia, PB XIII kemungkinan berhalangan hadir lantaran kepalanya pusing. "Dulu, waktu PB IX dan PB XI juga pernah berhalangan hadir dalam jumenengan. Waktu itu tidak menjadi masalah besar seperti sekarang yang seolah dibesarkan-besarkan," kata dia.

Mengenai kondisi PB XIII sakit pusing dibantah kubu Dwitunggal. "Sinuhun kondisinya sehat walafi at, saya barusan guyon-guyon. Beliau sekarang lenggah di dalam [Sasana Narendra]. Sinuhun dawuhi saya untuk berbicara kepada media agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi," timpal Condro.

Pesan yang disampaikan putra tertua PB XII, kata Condro, semua kerabat Keraton bisa menjaga kerukunan. "Sinuhun prihatin melihat kondisi ini. Beliau ingin permasalahan intern diselesaikan lebih dulu," kata dia.

Sementara itu, menantu PB XII lainnya, KP Eddy Wirabhumi menyatakan raja berhalangan hadir karena sedang meditasi di luar kota. "Raja sejak tadi pagi menelepon Mas Broto. Katanya mau pergi ke petilasan. Bagi kami, raja tidak hadir ya tidak masalah. Toh, acara jumenengan intinya tarian Bedaya Ketawang," pungkas Eddy.

Sejarawan muda Solo, Heri Priyatmoko, mengatakan sangat lucu apabila sosok raja tidak hadir dalam jumenengan. "Itu mengubah pakem.

Jika menengok sejarah Mataram Islam, dalam jumenengan, raja adalah daya tarik dan syarat utama," papar Heri kepada Espos.

Kejadian jumenengan yang tak dihadiri PB XIII menambah ruwet rekonsiliasi yang sudah ditandatangani PB XIII dengan Tedjowulan setahun lalu. Hingga kini, rekonsiliasi belum jalan. Akibatnya, bantuan dari Pemprov Jateng dan Pemkot Solo tak cair.

Heri menilai rekonsiliasi Keraton Solo berjalan di tempat. Heri menuturkan sampai saat ini masyarakat bertanya terkait posisi dan peran dua tokoh yakni raja dan mahapatih. Kekuatan dua tokoh itu tidak kelihatan dalam mengelola masa depan Keraton. - Muhammad Khamdi

## 2 Kubu Keraton Bentrok

SOLO—Dua kubu Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat bentrok dan saling baku pukul di kompleks Keraton Solo, Senin (26/8). Pengukuhan Maha Menteri, K.G.P.H. Panembahan Agung Tedjowulan pun dibatalkan.

Bentrokan beberapa kali terjadi sejak Senin siang hingga malam. Pada Senin malam, pintu Sasana Putra didobrak dengan menggunakan mobil Toyota Land Cruiser warna putih nopol AD 9430 DG. Hingga Senin malam, warga Baluwarti berkumpul di kompleks Keraton.

Kubu Lembaga Dewan Adat Keraton yang dipimpin Pengageng Sasana Wilapa G.K.R. Wandansari atau akrab disapa Mbak Moeng berusaha menggagalkan acara pengukuhan Maha Menteri dengan menyiagakan beberapa orang di Sasana Mulya sejak Minggu (25/8) siang.

Mereka menilai acara tersebut ditumpangi pihak luar Keraton Solo. Sementara kubu Keraton versi Dwitunggal Paku Buwono XIII dan Tedjowulan berusaha mengalihkan acara dari Sasana Mulya ke Sasana Narendra atau sebelah barat Kori Kamandungan.

Pada Senin pagi, ratusan abdi dalem Keraton Solo yang mendapatkan undangan berduyun-duyun menghadiri acara pengukuhan Maha Menteri disertai pelantikan pengageng Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

”Kami menyelenggarakan acara halalbihalal seperti biasa. Kan enggak apaapa,” papar Ketua Panitia, K.P.A.A. Cndrokusumo Suro Agul-Agul atau Begug Poernomosidi, saat ditemui wartawan di sela-sela kesibukannya melayani tamu undangan.

Tak berlangsung lama, sekitar pukul 09.15 WIB, rombongan putra-putri PB XII dan kerabat Keraton mendatangi Sasana Narendra. Spontan, sejumlah petugas yang berjaga langsung menutup pintu gerbang. Rombongan yang dipimpin Mbak Moeng berusaha mendorong pintu tersebut.

Mbak Moeng beserta putri PB XIII, G.K.R. Timoer Rumbai Kusumadewayani turut mengetuk pintu dengan keras. Bahkan, salah satu kerabat Keraton Solo meluapkan emosinya dengan mengusir Juru Bicara Keraton versi Dwitunggal, K.R.H. Bambang Pradotonagoro. Aksi pengusiran masing-masing dua kubu tidak bisa dielakkan. Aparat kepolisian yang berjaga di lokasi tak bisa berbuat apa-apa atas kekisruhan internal Keraton.

Selang 15 menit, kubu Dwitunggal membolehkan Mbak Moeng cs masuk ke Sasana Narendra dengan syarat para wartawan turut serta diperbolehkan masuk. Aksi dorong pintu kembali terjadi. Massa yang mengatasnamakan warga Baluwarti, Pasar Kliwon sempat bersitegang dengan kerabat dan pengawal Dewan Adat.

Di sisi barat Sasana Putra atau tepatnya di garasi mobil PB XIII, puluhan abdi dalem tiba-tiba keluar karena diusir. ”Ya saya diusir oleh Gusti Moeng. Padahal saya mendapat undangan dan ingin bertemu dengan Sinuhun,” papar abdi dalem dari Klaten yang enggan disebutkan namanya, kepada Espos.

Mbak Moeng mengatakan kerabat Keraton tidak tahu adanya acara pengukuhan Maha Menteri dan halalbihalal tersebut. ”Kami baru tahu undangan ini kemarin siang. Saya yakin Sinuhun ditekan oleh orang-orang dari luar untuk menyelenggarakan acara seperti ini. Wajar enggak orang luar bisa masuk ke sini,” kata Moeng.

Dia menceritakan PB XIII dipengaruhi orang-orang dari luar Keraton Solo. Sebab, saat ini kondisi kesehatan PB XIII tidak memungkinkan untuk menentukan keputusan. "Bantuan dari pemerintah 2010 senilai Rp350 juta malah dibelikan mobil oleh beliau [PB XIII]. Ini jelas menyalahi aturan adat," kata dia.

#### Rusak Cagar Budaya

Dalam kesempatan itu, Moeng sengaja menyisir sejumlah orang di Sasana Putra. Di saat itulah, orang kepercayaan PB XIII, Sosronagoro yang kala itu masih memakai celana pendek dan handuk diusir Mbak Moeng dan kerabat Keraton lainnya. "Keraton ini mau diinjak-injak oleh orang luar, itu dia kok seenaknya di sini," kata Moeng.

Di luar Keraton, ketegangan juga terjadi. Sekitar pukul 12.25 WIB, K.R.M.H. Satrio Hadinagoro meminta para abdi dalem pro Dwitunggal yang dudukduduk di depan Sasana Nalendra untuk pindah ke tempat lain. Atas perintah itu, puluhan abdi dalem meninggalkan lokasi.

Setelah itu, massa pendukung PB XIII dan Tedjowulan yang mengatasnamakan warga Kelurahan Baluwarti merasa tidak terima atas pembubaran yang dilakukan oleh Satrio.

K.R.H. Bambang Pradotonagoro mempertanyakan pembubaran para abdi dalem tersebut. Dia mengatakan Satrio tidak mempunyai wewenang membubarkan abdi dalem karena yang bersangkutan hanya menantu PB XII. Satrio sempat berdiskusi dengan Bambang namun upaya itu tak membuahkan hasil. Kericuhan pun memuncak dimulai.

Prajurit Keraton yang mengawal Satrio membawa senjata tajam berupamparang mengacungkan ke arah massa. Kedua kubu sempat saling pukul. Massa yang merasa dipukul tak terima dan membalas serta mengejar para prajurit berpakaian merah. Puluhan orang dari arah Sasana Nalendra langsung memburu prajurit Keraton yang membawa parang. Baku pukul tak bisa dihindari. Massa meminta prajurit tidak ada yang menggunakan senjata dan menyatakan bahwa Raja

Keraton Solo adalah PB XIII. Satrio mengatakan pihaknya tidak berhasrat untuk melakukan perlawanan. Perihal bentrok dua massa tersebut, Satrio mengatakan karena sama-sama emosi. "Karena saya ditarik-tarik, siapa sih orangnya yang tidak marah melihat bapaknya ditarik. Nah, prajurit itu berusaha mengamankan saya," tutur dia.

Salah satu warga, Hartono, menyatakan mereka merasa tidak nyaman terhadap adanya sekelompok anggota perguruan pencak silat yang masuk ke Keraton. Dia menganggap orang-orang itu adalah warga luar. Sekitar pukul 18.30 WIB, massa bergerombol di satu titik di depan Sasana Putra. Saat itu, muncul rumor PB XIII disandera. Sekelompok warga yang mengaku asal Baluwarti itu mulai terpancing.

Salah satu dari mereka mengendarai Toyota Land Cruiser dan menabrakkan mobil itu ke pintu Sasana Putra sekitar pukul 19.45 WIB. Setelah terjadi pendobrakan, sebagian warga masuk ke Sasana Putra. Sekitar dua jam kemudian mereka mulai keluar.

Juru Bicara Dwitunggal, Bambang Ary, terlihat dibawa ke Mapolsek Pasar Kliwon sekitar pukul 20.30 WIB. Kapolresta Solo, Kombes Pol. Asdjima'in meminta warga sekitar tidak ikut-ikutan dalam persoalan tersebut.

"Kami fokus dulu ke pengamanan Keraton. Untuk perusakan nanti kami tindak lanjuti. Yang jelas di dalam aman," ujar dia.

Mengenai perusakan pintu, Satryo Hadinagoro, menyatakan kejadian itu sudah termasuk langkah perusakan cagar budaya. Seharusnya, lanjut dia, polisi mengusut tindakan tersebut. - Muhammad Khamdi



## Warga Magersari Keraton Resah

SOLO—Warga Baluwarti, Pasar Kliwon, Solo yang menempati tanah magersari Keraton Solo resah seiring diungkitnya penempatan tanah Keraton oleh warga ketika konflik Keraton Solo meletus, Senin (26/8).

Warga merasa sakit hati dengan pernyataan dari kubu Dewan Adat yang dipimpin G.K.R. Wandansari atau Mbak Moeng saat mengusir warga ketika bentrokan dua kubu (Dwitunggal dan Lembaga Dewan Adat) pecah. Salah satu hal yang membuat warga sakit hati yakni pernyataan bahwa warga tak perlu macam-macam lantaran hanya tinggal di tanah magersari.

Warga pun menumpahkan keluhkesah mereka saat halalbihalal yang digelar Kamis (29/8) malam yang dihadiri Paku Buwono (PB) XIII dan Maha Menteri K.G.P.H Panembahan Agung Tedjowulan.

Ketua RW 001 Baluwarti, Muhammad Husni, menyampaikan pernyataan itu membuat keresahan dan menyulut kemarahan warga. "Sejumlah warga mendengar pernyataan itu yang membuat kemarahan warga. Meski magersari, setidaknya kami ada benang merah dengan Keraton. Kakek saya, ibu saya lahir di sini. Dulu sebagai abdi dalem. Ikut nguriuri budaya," jelas dia saat ditemui Espos, Jumat (30/8).

Husni menuturkan meski hanya tinggal magersari di tanah Keraton, warga siap membantu Keraton. "Tetapi kok tiba-tiba ada pernyataan seperti itu," tambahnya.

Dia mengatakan sebenarnya warga tak mau ikut campur dengan konflik internal Keraton. Warga berusaha tak memihak salah satu kubu dan menghormati seluruh pihak. Namun, lantaran sikap tersebut membuat sikap warga berubah. "Sejak lama kami berkeyakinan seorang raja itu ya hanya satu, yakni Sinuhun PB XIII yang kekuasaannya absolut," katanya.

Anggota DPRD Solo yang juga warga Baluwarti, Hammi Mujadid Irsyad, menuturkan pertemuan Kamis malam memberi arah positif terkait komunikasi warga dengan Raja. "Sekitar lima tahun ini kami sulit untuk berkomunikasi dengan Raja. Kami sangat merespons positif pernyataan Gusti Tedjowulan yang menyampaikan warga Baluwarti merupakan bagian Keraton dan perlu dibangun komunikasi secara intens," ungkap warga RT 002/ RW 005 itu.

Hammi menuturkan selama ini warga kesulitan saat memindahtangankan rumah ke orang lain. Alhasil, proses jual-beli rumah selama ini dilakukan di bawah tangan. "Jual-beli bangunan seharusnya melaporkan ke Keraton. Tetapi karena itu susah, ya warga melakukan jual-beli di bawah tangan," ungkapnya.

Hammi mengatakan warga bersiap mengajukan sertifikat hak milik (SHM) ke BPN karena warga sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan menempati tanah lebih dari 20 tahun. "Meski tanah palilah, dari sisi agraria tanah yang ditempati warga merupakan tanah negara," ujar dia.

Sementara itu, kubu Lembaga Dewan Adat menanggapi santai pertemuan warga dengan PB XIII. "Silaturahmi baik selama tidak ada provokasi," ungkap Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton Solo, K.P. Eddy Wirabhumi.

Disinggung keresahan warga, Eddy menuturkan hal itu sah-sah saja disampaikan warga. "Kalau itu murni keresahan warga, saya rasa bagusbagus saja. Kalau tidak murni, misalnya ada unsur kepentingan tersembunyi seperti menyangkut tanah, Keraton ini kan bukan miliknya raja, ini milik dinasti. Semua harus melestarikan itu," ucap suami Mbak Moeng ini.

Dijelaskannya, tak semestinya warga berkeinginan memiliki hak atau raja menjanjikan tanah di kawasan Keraton untuk dimiliki warga. Eddy mengakui di kawasan Keraton ada sejumlah persoalan terkait pertanahan. "Memang banyak persoalan terkait itu yang sudah bertahun-tahun tidak selesai, ini selesai dengan baik."

#### Cabut Fasilitas Negara

Sementara itu, Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, mulai gemas dengan konflik Keraton Solo yang seolah tak berujung pangkal. Dia mengancam akan mencabut seluruh fasilitas negara di Keraton jika kedua kubu berselisih tak menunjukkan iktikad menyelesaikan masalah. "Pertemuan langsung ini untuk menyelesaikan. Namun kalau mereka enggak mau ya sudah. Fasilitas negara mungkin tidak akan diberi," ujarnya saat ditemui wartawan di SMAN 8, Jumat.

Pihaknya menyayangkan pernyataan-pernyataan sumir yang seolah ingin merintang jalan mediasi. Wali Kota menandakan Pemkot berkewajiban memelihara situs budaya seperti Keraton sesuai amanat UU No.11/2010 tentang Cagar Budaya.

Mediasi akan menitikberatkan soal eksistensi Raja Solo, PB XIII Hangabehi, di lingkungan keraton. Posisi K.G.P.H Panembahan Agung Tedjowulan yang bakal dilantik menjadi Maha Menteri Pengamat Keraton Solo, Heri Priyatmoko, sepakat dengan Pemkot yang ingin mencabut fasilitas negara jika mediasi kembali gagal. Menurut Heri, sudah saatnya Pemkot memberi "sanksi" konkret kepada pihak yang berpolemik.

Heri menilai masyarakat pun mulai jenuh dengan konflik Keraton dan butuh tindakan taktis dari Pemkot. Menurutnya, pemutusan sejumlah fasilitas di Keraton tidak akan berpengaruh terhadap kondisi bangunan Keraton.

Dari Jogja, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, bersedia memediasi kisruh di Keraton Solo ketika permintaan mediasi itu datang dari kedua pihak yang bersengketa.

"Masalahnya permintan harus dari kedua belah pihak. Baru saya pertimbangkan. Kalau satu pihak enggak, karena yang berseterus dua pihak," kata Sultan kepada wartawan di kompleks Kantor Gubernur, Kepatihan, Jumat (30/8).

Di sisi lain, pengemudi Toyota Land Cruiser putih berpelat nomor AD 9430 DG yang mendobrak pintu Sasana Putra kompleks Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Senin (26/8), diburu aparat Polresta Solo. Hingga kini sopir itu belum diketahui keberadaan dan identitasnya.

Penyidik sedikitnya telah memeriksa 31 saksi dalam kasus perusakan tersebut. Kasatreskrim Polresta Solo, Kopol Rudi Hartono, saat dimintai konfirmasi Espos, Jumat (30/8), menginformasikan penyelidikan masih terus dilaksanakan. "Kami masih memperbanyak para saksi [untuk diperiksa]. [Penyelidikan berjalan] pelan tapi pasti," tulis Rudi dalam pesan singkat (SMS) yang diterima Espos.



Kasubaghumas Polresta Solo, AKP Sis Raniwati, mengungkapkan pengamanan di Keraton belum dicabut. Namun, kekuatan pengamanan perlahan dikurangi mengingat kondisi Keraton terpantau berangsur kondusif. - Taufiq Sidik Prakoso



BALAI KOTA—Rencana mediasi konflik Keraton Solo yang melibatkan putra-putri Paku Buwono (PB) XII mulai menemui titik terang. Pemkot Solo memastikan mediasi bakal digelar pekan depan setelah mendapat lampu hijau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, optimistis pertemuan digelar pekan depan menyusul dukungan dari Kemendagri. Sebelumnya, Rudy banyak berkomunikasi dengan Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri ihwal penyelesaian konflik Keraton.

Menurut Wali Kota, pemerintah pusat bersedia ikut menjembatani mediasi bersama Pemkot. "Kami sudah mengirim surat ke Kemendagri terkait kepastian mediasi. Nantinya, pernyataan resmi Kemendagri akan kami jadikan landasan untuk mengundang putra-putri Sinuhun PB XII," ujarnya saat ditemui wartawan di Balai Kota, Rabu (11/9).

Rudy mengatakan mediasi yang akan digelar di Pendhapi Gede Balai Kota ini diharapkan mampu menyelesaikan tuntas polemik dalam Keraton. Pihaknya tak ingin selepas pertemuan masih ada riak-riak yang mengganggu perdamaian. Wali Kota meminta putra-putri PB XII yang berhalangan hadir dapat mengamini hasil mediasi.

"Yang tidak datang tentunya harus mematuhi keputusan yang telah diambil. Namun kami harapkan seluruh putra-putri Sinuhun PB XII dapat hadir agar persoalan bisa diselesaikan secara santun," tuturnya.

Rudy menargetkan beberapa hari ke depan undangan sudah bisa diterima. "Segera dilayangkan satu-dua hari ke depan. Sehingga, putra-putri yang tinggal di luar kota bisa mempersiapkan diri untuk hadir." Juru bicara kubu Dwitunggal, K.R.H. Bambang Pradotonogaro, mengaku siap menghadiri mediasi yang digelar Pemkot. Menurutnya, para putra dalem Keraton Solo mendukung agar mediasi segera digelar.

"Kami siap diundang, kami menghormati inisiatif Pak Wali," ujarnya kepada Espos.

Disinggung agenda yang diusulkan dibahas, Bambang menolak berkomentar. Pihaknya memilih menunggu proposal yang diajukan Pemkot sebelum melangkah lebih jauh. Termasuk membicarakan soal Lembaga Dewan Adat yang dituding memperkeruh konflik Keraton. "Kami lihat dulu proposalnya seperti apa. Kami belum mau menyinggung sampai ke sana [Dewan Adat]."

Sementara itu, kubu Dewan Adat yang tak mengakui rekonsiliasi PB XIII dan K.G.P.H. Panembahan Agung Tedjowulan, belum pasti hadir dalam rencana mediasi oleh Pemkot. Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton Solo, K.P. Eddy Wirabhumi, mengaku masih perlu berkomunikasi dengan anggota Dewan Adat yang lain soal undangan Pemkot.

"Saya tidak bisa memutuskan sendiri. Lagi pula undangan juga belum kami terima. Saya masih berada di Jakarta," ujarnya kepada Espos, Rabu.